BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Tercatat sampai tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Sebagai negara kepulauan serta salah satu negara berkembang Indonesia tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan pusat statistik mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 131 juta jiwa, jumlah tersebut meningkat 1.16% dari data bulan Agustus 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak pengangguran di seluruh wilayah di Indonesia, data menyebutkan pada Agustus 2018 pengangguran di Indonesia sebesar 5.64%. Upaya penyediaan lapangan kerja buktinya belum cukup untuk menutupi besarnya pengangguran saat ini.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata tidak mampu merealisasikan harapan. Tambahan tenaga kerja yang terserap relatif kecil. Angka pengangguran masih saja tinggi. Hal ini terjadi

antara lain karena adanya pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum. (Dimas, 2009)

Pembangunan nasional yang berpusat di pulau jawa menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Menurut badan pusat statistik pertumbuhan ekonomi di pulau jawa pada tahun 2017 mencapai 5,24 persen. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengumpulan dan pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu yang disebut aglomerasi, sehingga akan menarik orang-orang disekitar pusat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi daya tarik orang-orang untuk datang mencari pekerjaan ke pulau jawa. Terutama di DKI Jakarta masyarakat beranggapan bahwa akan selalu adanya lapangan pekerjaan dan mudahnya mencari uang di Jakarta, akan tetapi pada kenyataannya tidak.

Masyarakat yang datang mencari pekerjaan di pulau jawa beranggapan tersedia banyaknya lapangan kerja, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan pekerjaan kerana di pulau jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi, ditambah pula banyaknya perusahaan yang bangkruk akibat corona. Hal ini mengakibatkan pulau jawa menjadi konsentrasi pembangunan, kondisi ini berbeda dengan kondisi di luar pulau jawa.

Tingginya konsentarsi pembangunan di pulau jawa menyebabkan tingginya kompetisi penggunaan sumberdaya non-tenaga kerja dikawasan tersebut. Secara ilmiah, SDM dengan kualitas relative rendah akan kalah dalam kompetisi tersebut. Padahal nyatanya, hampir 80% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur.

Belajar dari pembangunan negara maju, muncul keyakinan banyak negara berkembang bahwa industri dipandang sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketinggalan dari negara maju. Selain industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, di sisi lain industri dapat mengikis keterbelakangan, kemiskinan, dan mempercepat proses modernisasi. Atas dasar keyakinan itu banyak negara sedang berkembang meletakkan industri sebagai sebagai sektor unggul (*leading sector*) pada strategi pembangunan.

Keadaan pasar di Indonesia yang saat ini berpusat di pulau jawa menjadikan pulau tersebut memiliki angkatan kerja tertinggi di bandingkan dengan pulau lain nya. Pulau jawa juga tercatat sebagai pulau dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia, menjadikan kompetisi dalam dunia kerja lebih tinggi dari yang seharusnya. Salah satu capaian dari empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah mengenai penyerapan lapangan kerja yang ditargetkan sedari awal sebesar 10 juta. Sampai empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, tercatat target tersebut hampir tercapai menuju 10 juta penyerapan lapangan kerja hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK. (Putera, 2018)

Tabel 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2017-2018

PULAU	TAHUN	
	2017	2018
Sumatera	27.036.466	27.996.460
Jawa	73.909.597	75.851.030
Kalimantan	7.744.740	7.997.537
Sulawesi	8.725.369	9.133.524
Nusa Tenggara-Bali	7.229.228	7.249.017
Maluku-Papua	3.417.346	3.578.073

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Pada table 1.1 menjelaskan bahwa pada 2 tahun terakhir pulau jawa masih menjadi pulau dengan tenaga kerja terbesar di Indonesia, di ikuti oleh pulau sumatera. Dimana pada pulau dari tahun 2017 ke 2018 bertambah sebesar 1.941.433 juta jiwa. Jumlah tersebut sangat tidak merata bagi pulau-pulau lainnya. Akan tetapi jumlah angkatan kerja yang tidak merata tersebut membuktikan bahwa Indonesia bagian barat masih menjadi bagian yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja yang paling sedikit.

Hal ini menyebabkan terjadinya proses urbanisasi besar-besar ke pulau jawa. Sehingga terjadinya penumpukan masyarat dari pulau jawa khususnya DKI Jakarta. Fenomena urbanisasi yang cukup parah terjadi adalah urbanisasi pascalebaran. Dimana fenomena ini dimanfaatkan sebagian besar masyarakat daerah untuk datang ke Jakarta. Pascalebaran arus urbanisasi semakin meningkat. Sebagian besar tujuan mereka pergi ke kota atau ke daerah yang lebih potensial dari segi ekonomi untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Diperparah lagi banyaknya perusahaan yang bangkrut akibat corona di tahun 2020 ini. Anggapan daerah kota lebih mapan dan maju secara ekonomi masih menjadi asumsi mayoritas masyarakat. Sekalipun mereka merasa bahwa mereka kekurangan dalam berbagai hal.

Grafik 1.1 Penyerapan Tenaga Pakerja di Pulau Jawa Tahun 2012-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (dalam juta jiwa)

Seperti umumnya negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan setiap daerah memiliki keragaman keunggulan sumber daya alam. Di sisi lain Indonesia memiliki jumlah penduduk atau angkatan kerja yang sangat tinggi. Industri manufaktur dipandang sebagai industri strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah tersebut, yang pada gilirannya akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. (Suharto, 2009) Akan tetapi, pemerintah masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik untuk Indonesia. Di karenakan kurangnya mesin-mesin pengelola sehingga negara lebih memilih mengeksportkan sumber daya alam Indonesia guna untuk di kembangkan atau dibuat di negara lain. Dan terkadang setelah sudah diolah oleh negara tetanga negara mengambilnya dengan biaya 2 kali lipat dari yang semestinya.

Dalam pelaksanaannya, industri manufaktur membutuhkan modal yang banyak. Salah satu sumber modal industri adalah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi capital. Melalui investasi kapasitas produksi yang dapat ditingkatkan. Kapasitas produksi yang besar selanjutnya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga peningkatan produksi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang besar selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. (Sadono, 1994)

Sepanjang 2018, investasi asal Singapura yang masuk ke Indonesia mencapai 9,2 miliar dollar AS, atau 39,4 persen dari total PMA. Di tempat kedua ada Jepang. Investasi yang berasal dari Negeri Sakura ini mencapai 4,9 miliar dollar AS, atau 16,7 persen dari total PMA. Menyusul di bawahnya ada China dengan nilai investasi 2,4 miliar dollar AS, Hong Kong sebesar 2 miliar, dan Malaysia sebesar 1,9 miliar dollar AS. BKPM tidak merinci seluruh PMA masuk ke sektor mana saja, namun dari investasi total (PMDN dan PMA), sejumlah sektor usaha menjadi favorit. Lima sektor usaha tersebut yakni listrik, gas dan air dengan investasi Rp 117,5 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 94,9 triliun, pertambangan Rp 73,8 triliun. Selanjutnya ada sektor industri makanan Rp 68,8 triliun dan perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 56,8 triliun (Sukmana, 2019).

Untuk investasi di pulau Jawa merupakan nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia dalam memiliki sumber daya alam yang cukup besar contohnya di bidang pertanian, pertambangan dan industri. Oleh karena itu pulau Jawa memiliki keunggulan komperatif dan juga kompetitif untuk kegiatan investasi. Pada

table 1.3 dapat dilihat kegiatan investasi PMA, pada tahun 2013 jumlah PMA naik berkisar \$ 3.756,5 juta dari tahun lalu. Akan tetapi investasi tersebut harus terus turun sampai titik terendah ditahun 2017. Beruntungnya pemerintah dapat kembali menaikan investasi di tahun 2018, akan tetapi besarnya tidak sebesar pada tahun 2013.

Grafik 1.2 Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Jawa Tahun 2012-2018

Sumber : BKPM, data diolah peneliti (dalam US\$ juta)

Sedangkan dalam proses penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dilakukan pemerintah sangat membantu karena jumlah jauh lebih besar dibandingkan penanaman modal asing (PMA) seperti yang terlihat pada grafik 1.2. Dan modal tersebut secara signifikan terus menaik tinggi dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dengan sangat baik memanfaatkan sumber daya yang ada terutama dalam sektor listrik, gas, air, tekstil, transportasi, gudang dan telekomunikasi.

Grafik 1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Jawa Tahun 2012-2018

Sumber : BKPM, data diolah peneliti (dalam US\$ juta)

Hubungan negatif antara tingkat investasi dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan ketidaksesuaian teori yang selama ini berlaku. Menurut teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar tidak berlaku bagi kasus di DKI Jakarta. (Dimas, 2009) Tidak adanya pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dimungkinkan karena para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas dari barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien, akibat penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah (Wasilaputri, 2016).

Penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh upah. Upah diberikan kepada para pekerja tentu dianggap sebagai harga dan tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, dan perbedaan jenis pekerjaan.

Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri. Berdasarkan teorinya, upah yang tinggi membuat biaya produksi juga meningkat, akibatnya harga suatu produk juga meningkat. Peningkatan harga produk suatu barang menurunkan permintaan akan barang tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi permintaan tenaga kerja. (Sumarsono, 2003) Upah pekerja di pulau jawa cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi produktivitas menurun diakibatkan oleh tenaga kerja yang kurang terampil, sehingga efisiensi merendah dan waste yang meningkat. Apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, upah yang tinggi cenderung akan mengurangi jumlah pekerja yang bekerja pada luar jawa, dikarenakan para pemberi kerja akan mengurangi jumlah pekerja yang digunakan untuk memperoleh laba maksimum.

Dinamika penanaman modal atau investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi untuk membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. (Dumairy, 1997) Sementara upah, walaupun tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan

mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, yang selanjutnya juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Tingkat upah memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat upah seraca signifikan merupah penyerapan kerja yang ada di DKI Jakarta. Hubungan negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan kesesuaian teori yang selama ini berlaku. (Dimas, 2009) Upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja. Di samping itu kenaikan tingkat upah akan mendorong pengusaha menggunakan teknik yang cenderung padat modal dalam proses produksinya agar tercapai tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih besar sehingga mengorbankan para pekerja. (Payaman, 2001)

Kenaikkan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi

tenaga kerja yang dibutuhkan (Wasilaputri, 2016). Sehingga perusahaan lebih memilih mesin dan otomisasi yang menghasilkan barang tinggi tanpa mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas dan dengan sendirinya profit akan meningkat, walaupun pengangguran tetap meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah penyerapan tenaga kerja di pulau jawa adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat investasi mengakibatkan rendah pula lapangan pekerjaan yang ada
2. Kurang berdampaknya investasi di pulau jawa terhadap penyerapan tenaga kerja
3. Rendahnya upah yang diperoleh masyarakat sehingga masyarakat kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.
4. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di pulau jawa mengakibatkan ketidak merataan pembagian upah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh berbagai aspek, dimensi, serta faktor-faktor, yang sangat luas dan kompleks, maka peneliti membatasi masalah hanya pada “Pengaruh Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Pulau Jawa”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa ?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa ?
3. Apakah terdapat pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teroritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penyerapan tenaga kerja di pulau jawa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya jumlah angkatan kerja di pulau jawa. Dalam penelitian ini

membahas dua faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu investasi dan upah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk referensi penelitian selanjutnya tentang investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa.